



## **PENGADILAN NEGERI SIBOLGA KELAS II**

Jln. Padangsidempuan Nomor 06 Kota Sibolga, Telp/Fax. 0631-21572

Website: www.pn-sibolga.go.id Email: pnsibolga@gmail.com

### **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SIBOLGA**

**NOMOR: W2.U9. 2050 /KPN/SK/X/2017**

#### **TENTANG**

#### **PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS PENGADILAN NEGERI SIBOLGA**

#### **KETUA PENGADILAN NEGERI SIBOLGA**

- Memperhatikan** : a. Rapat Sosialisasi Penanganan Benturan Kepentingan dan Zona Integritas di Pengadilan Negeri Sibolga pada tanggal 29 September 2017.
- b. Penandatanganan Piagam Pencanangan Pembangunan Zona Integritas Pengadilan Negeri Sibolga tanggal 2 Oktober 2017.
- Menimbang** : a. Bahwa sebagai upaya akselerasi reformasi birokrasi pada Pengadilan Negeri Sibolga, utamanya mewujudkan birokrasi yang bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme maka perlu langkah kongkrit dengan memulai pembangunan Zona Integritas pada Pengadilan Negeri Sibolga.
- b. Bahwa untuk itu perlu dibentuk Tim Pembangunan Zona Integritas pada Pengadilan Negeri Sibolga;
- c. Bahwa penunjukkan berdasarkan kapabilitas dan kompetensi, sehingga tim dan bekerja efektif dan efisien mewujudkan birokrasi Pengadilan Negeri Sibolga yang bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
4. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 194A/KMA/SK/XI/2014 Tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Mahkamah Agung Republik Indonesia;
5. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 59A/Sek/SK/11/2014 Tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Mahkamah Agung dan Peradilan di Bawahnya.

6. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 59A/Sek/SK/11/2014 Tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Mahkamah Agung dan Peradilan diBawahnya.

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SIBOLGA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS PENGADILAN NEGERI SIBOLGA;
- KESATU : Membentuk Tim Pembangunan Zona Integritas Pengadilan Negeri Sibolga sebagaimana terlampir;
- KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu adalah:
- Menyusun rencana kerja pembangunan zona integritas dengan memprioritaskan pada target tujuan pembanguan wilayah bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi bersih dan melayani.
  - Memberikan dukungan pada masing-masing unit pelayanan untuk mewujudkan wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi bersih dan melayani dilingkungan Pengadilan Negeri Sibolga.
  - Membangun Koordinasi, fasilitasi, Monitoring, evaluasi pengawasan yang efektif untuk mempercepat pembangunan zona integritas dilingkungan Pengadilan Negeri Sibolga.
  - Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Ketua Pengadilan Negeri Sibolga.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan akan dilakukan perbaikan apabila dikemudian hari ditemukan kekeliruan dalam surat keputusan ini.

Ditetapkan : Sibolga

Pada Tanggal : 2 Oktober 2017

**KETUA PENGADILAN NEGERI SIBOLGA,**

**MARTUA SAGALA, S.H., M.H.**

**NIP. 1969 1023 1990 03 1 005**

Salinan Keputusan Ini disampaikan kepada:

1. Yth. Sekretaris Mahkamah Agung RI di-Jakarta.
2. Yth. Dirjen Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI di-Jakarta.
3. Yth. Ketua Pengadilan Tinggi Medan di-Medan.
4. Arsip. ✓



Lampiran : Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Sibolga  
Nomor : W2.U9.2050/KPN/SK/X/2017  
Tanggal : 2 Oktober 2017

**SUSUNAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS  
PENGADILAN NEGERI SIBOLGA**

Penanggung jawab : Ketua Pengadilan Negeri Sibolga  
Ketua : Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sibolga  
Sekretaris I : Panitera Pengadilan Negeri Sibolga  
Sekretaris II : Sekretaris Pengadilan Negeri Sibolga

**1. Komponen Manajemen Perubahan**

Koordinator : Obaja D.J.H. Sitorus, S.H.  
Anggota : Antoni G.P. Butar-Butar, S.H.

**2. Komponen Penataan Tatalaksana**

Koordinator : Bob Sadiwijaya, S.H., M.H.  
Anggota : Kiky Lerrick Siahaan, S.H.

**3. Komponen Penataan Manajemen Sumber Daya Manusia**

Koordinator : Boy J.P. Sembiring, S.H.  
Anggota : Edward Siahaan.

**4. Komponen Penguatan Akuntabilitas**

Koordinator : Marolop W.P. Bakara, S.H.  
Anggota : Ojahan Sibatuara.

**5. Komponen Penguatan Pengawasan**

Koordinator : Tetty Siskha, S.H., M.H.  
Anggota : Chatrine E.Y. Br. Sitorus, S.E.

**6. Komponen Penguatan Kualitas Pelayanan Publik**

Koordinator : Punia Hutabarat, S.H.  
Anggota : Tioraden Tarihoran.

**7. Komponen Hasil Terwujudnya Peradilan yang Bersih dan Bebas KKN  
serta Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik**

Koordinator : Aslam Irfan Daulay, S.H.  
Anggota : Jalbertny Zebua, S.H.

Ditetapkan : Sibolga  
Pada Tanggal : 2 Oktober 2017

**KETUA PENGADILAN NEGERI SIBOLGA**



**MARTUA SAGALA, S.H., M.H.**  
NIP. 1969 1023 1990 03 1 005